

ANALISIS DASAR GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG: KESIAPAN DAERAH MENUJU TATA KELOLA HIJAU

Yoga Andriyan¹

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: yogaandriyanmana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menerapkan konsep *green government* sebagai fondasi tata kelola hijau daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain *sequential explanatory*, diawali dengan survei kuantitatif terhadap aparatur sipil negara pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kualitatif untuk memperkuat dan menjelaskan hasil numerik. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kesiapan green government berada pada kategori sedang dengan skor indeks rata-rata 3,21 dari 5,00; dimensi teknologi digital dan komitmen pimpinan memiliki tingkat kesiapan tertinggi, sementara kapasitas SDM dan partisipasi publik berada pada tingkat terendah. Hasil kualitatif menegaskan bahwa implementasi tata kelola hijau masih terkendala oleh keterbatasan regulasi, koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah, serta rendahnya pemahaman teknis aparatur dan partisipasi masyarakat. Integrasi kedua temuan memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong berada dalam fase awal transformasi hijau, dengan potensi penguatan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi, perbaikan regulasi, serta perluasan kolaborasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa green government di Kabupaten Sorong memiliki dasar yang positif, namun memerlukan langkah strategis dan terencana agar dapat berkembang menjadi tata kelola hijau yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: green government; tata kelola hijau; kesiapan daerah; pemerintah daerah; Kabupaten Sorong

Abstract

This research aims to analyze the readiness of the Sorong Regency Government in implementing the concept of green government as the foundation for local green governance. The research approach uses a mixed methods approach with a sequential explanatory design, starting with a quantitative survey of civil servants in several relevant Regional Government Organizations, followed by qualitative interviews to strengthen and explain the numerical results. The results of the quantitative research show that the level of green government readiness is in the moderate category with an average index score of 3.21 out of 5.00; the digital technology dimension and leadership commitment have the highest level of readiness, while human resource capacity and public participation are at the lowest level. Qualitative results confirm that the implementation of green governance is still constrained by regulatory limitations, lack of coordination between Regional Government Organizations, and low technical understanding among officials and community participation. The integration of the two findings shows that the Sorong Regency Government is in the early phase of green transformation, with potential for strengthening thru increased human resource capacity, technology optimization, regulatory improvements, and expanded public collaboration. This research concludes that green government in Sorong Regency has a positive foundation, but requires strategic and planned steps to develop into effective and sustainable green governance.

Key words: green government; green governance; regional readiness; local government; Sorong Regency

Article History:

Received : 2025-06-15

Revised : 2025-06-30

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, krisis iklim, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah memberikan tekanan signifikan terhadap

keberlanjutan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis mempercepat degradasi lingkungan dan memperlebar ketimpangan sosial. Dalam menanggapi tantangan ini, diskursus mengenai pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan semakin menguat dalam kajian administrasi publik dan kebijakan pembangunan (Marinescu et al., 2024).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, muncul konsep green government dan green public administration sebagai paradigma baru yang menekankan integrasi nilai keberlanjutan ke dalam proses, struktur, dan budaya birokrasi. Pemerintahan hijau tidak hanya dipahami sebagai kumpulan program lingkungan, melainkan sebagai pendekatan pemerintah dalam merancang layanan publik, mengelola sumber daya, dan mengatur interaksi dengan masyarakat secara lebih ramah lingkungan, efisien, dan transparan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desain layanan pemerintah yang berkelanjutan berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja pelayanan publik serta pencapaian indikator SDGs di tingkat lokal (Megawati, Alfarizi, & Syamsul, 2024).

Sejalan dengan itu, sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa administrasi publik hijau tidak dapat beroperasi secara independen, melainkan didukung oleh etika lingkungan aparat, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Governance hijau yang efektif terbukti meningkatkan nilai masyarakat terhadap perilaku ramah lingkungan, partisipasi dalam inisiatif ekologi, dan dukungan terhadap kebijakan pro-lingkungan yang dihasilkan oleh pemerintah (Khodaparasti & Bagheri, 2023).

Dengan munculnya e-government dan digitalisasi administrasi publik, ada peluang sekaligus tantangan untuk memperkuat pemerintahan hijau. Studi internasional menunjukkan bahwa penerapan e-government dapat meningkatkan kinerja lingkungan, antara lain dengan mengurangi penggunaan kertas, efisiensi energi operasional, dan pengurangan jumlah proses birokrasi yang berlebihan (Fu, 2025). Di sisi lain, penerapan e-government berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat, sehingga menjadi dasar penting bagi transformasi menuju pemerintahan yang lebih berkelanjutan dan responsif (Sugiono, 2021).

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa agenda transformasi hijau dalam pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari agenda modernisasi birokrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan reformasi kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang strategis untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Studi tentang tata kelola hijau, ekonomi hijau, dan pemerintahan hijau di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan (Bahri et al., 2024).

Berbagai studi kasus di Indonesia juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mulai mengadopsi konsep pemerintahan hijau dan tata kelola hijau, misalnya melalui pengembangan kota berwawasan lingkungan, pengelolaan desa wisata hijau, atau program kabupaten hijau. Implementasi prinsip pemerintahan hijau di Kota Bogor, misalnya, menegaskan pentingnya komitmen kebijakan, regulasi pendukung, dan konsistensi pelaksanaan program guna menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah tantangan urbanisasi (Kasturi, 2023). Studi lain menegaskan pentingnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kerangka tata kelola hijau, khususnya di daerah yang memiliki kekayaan ekologis dan budaya, seperti desa wisata dan kawasan konservasi (Wiswayana, W. M., Yunita, P., Indraswari, F. V., & Ponce, 2024).

Secara konseptual, praktik pemerintahan hijau terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja SDGs di tingkat daerah, baik melalui penguatan desain layanan ramah lingkungan, tata kelola berkelanjutan, maupun pemanfaatan system informasi pemerintah daerah. Studi di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan hijau yang terintegrasi dengan system informasi pemerintahan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target SDGs lokal, terutama dalam sektor lingkungan dan kualitas pelayanan public (Megawati, Alfarizi, Eprilianto, et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan

pemerintahan hijau merupakan salah satu strategi utama untuk mengintegrasikan agenda reformasi birokrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Namun tidak semua wilayah memiliki tingkat kesiapan yang seragam untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan hijau. Beberapa kendala yang sering dijumpai meliputi keterbatasan regulasi turunan di tingkat daerah, lemahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam isu lingkungan, keterbatasan pendanaan, serta suboptimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kebijakan hijau (Nasios & Ph, 2025). Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, termasuk minimnya integrasi indikator lingkungan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Sundah, 2024).

Dalam konteks ini, Kabupaten Sorong memiliki posisi yang sangat strategis. Kabupaten ini terletak di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun juga rentan terhadap tekanan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya, dan perubahan penggunaan lahan. Namun, dari sudut pandang akademik, penelitian yang secara khusus mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong untuk beralih ke pemerintahan hijau masih sangat minim. Mayoritas penelitian mengenai green governance dan green government di Indonesia terfokus pada kota-kota besar, desa wisata tertentu, atau kabupaten yang telah mendeklarasikan diri como kabupaten hijau, sehingga belum memberikan gambaran dasar (baseline) bagi daerah seperti Sorong (Kasturi, 2023).

Tidak adanya pemetaan awal tentang kondisi kebijakan, kelembagaan, kapasitas aparatur, dan dukungan teknologi yang ada di Kabupaten Sorong dari sudut pandang pemerintahan hijau menyebabkan kelangkaan informasi yang signifikan. Sulit bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana transformasi tata kelola hijau yang tepat sasaran, terukur, dan relevan dengan konteks lokal tanpa melakukan analisis dasar tentang kesiapan daerah. Meskipun demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa memasukkan elemen lingkungan ke dalam tata kelola pemerintahan memerlukan proses yang bertahap. Ini termasuk memperkuat kerangka konseptual, melakukan pemetaan kapasitas, membuat instrumen kebijakan, dan membuat sistem untuk menilai kinerja pemerintah daerah yang ramah lingkungan (Marinescu et al., 2024).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang disebut sebagai "Analisis Dasar Pemerintahan Hijau pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau" relevan dan penting. Penelitian ini adalah studi dasar yang menggambarkan seberapa siap Pemerintah Kabupaten Sorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip pemerintah hijau dari berbagai aspek, seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, pemanfaatan e-government, dan dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan literatur tentang kesiapan pemerintah hijau di Kabupaten Sorong dan memberikan rekomendasi untuk pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory yang merupakan integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dalam satu kesatuan metodologis. Desain ini dipilih karena fenomena *green government* tidak hanya dapat dipahami melalui ukuran numerik semata, tetapi juga perlu dianalisis secara mendalam melalui konteks sosial, kelembagaan, dan persepsi pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan valid terhadap tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menerapkan tata kelola hijau (*green government*). Model desain sequential explanatory telah banyak digunakan dalam kajian pemerintahan dan isu-isu keberlanjutan sebagai upaya menjembatani pengalaman empiris dengan pola numerik yang luas (Lackson et al., 2025).

Dalam tahap awal, penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif melalui survei kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *green government*, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta sekretariat daerah. Survei ini dirancang untuk mengukur variabel-variabel utama

yang menjadi indikator kesiapan daerah, yaitu regulasi dan kebijakan pro-lingkungan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan, komitmen pimpinan, serta partisipasi publik. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin untuk menilai persepsi dan kesiapan pelaksanaan kebijakan *green government*. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola umum kesiapan daerah, serta uji reliabilitas dan validitas instrumen untuk memastikan keakuratan ukuran yang digunakan. Analisis statistik lanjutan seperti regresi atau Structural Equation Modeling (SEM) dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel jika diperlukan (Sasfiani & Adelia, 2024).

Setelah data kuantitatif diolah dan dianalisis, penelitian dilanjutkan pada tahap kualitatif untuk menafsirkan hasil angka dan memberikan konteks empiris yang lebih dalam. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan kajian dokumen kebijakan daerah. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat struktural, fungsional, perencana kebijakan, serta pemangku kepentingan lain seperti tokoh masyarakat dan akademisi yang memiliki keterkaitan dengan isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Data kualitatif dianalisis dengan teknik tematik yang melibatkan reduksi data, penyajian tematik, dan kesimpulan melalui triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Pendekatan ini sesuai dengan praktik yang telah digunakan dalam studi-studi pemerintahan dan kebijakan publik yang menggabungkan wawasan naratif dengan bukti empiris kuantitatif (Lackson et al., 2025).

Pada tahap terakhir, hasil dari kedua pendekatan diintegrasikan melalui explanation building, yakni strategi yang menghubungkan hasil statistik dengan narasi kualitatif untuk membangun suatu penjelasan yang kohesif terkait kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menerapkan *green government*. Integrasi ini memungkinkan peneliti tidak hanya menyajikan angka statistik, tetapi juga memahami alasan di balik angka tersebut, termasuk hambatan kelembagaan, tantangan sumber daya, serta persepsi aparat dan pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan hijau. Pendekatan mixed methods seperti ini telah diakui secara luas sebagai metode yang mampu menangkap kompleksitas isu-isu keberlanjutan, pemerintahan, dan integrasi kebijakan sosial-ekologis (Lackson et al., 2025).

Dalam hal validitas dan reliabilitas metode, penelitian ini menerapkan beberapa strategi: (1) uji reliabilitas instrumen kuantitatif melalui Cronbach's Alpha, (2) validasi isi melalui ahli metodologi dan ahli administrasi publik, (3) triangulasi sumber data dan teknik analisis untuk menguatkan temuan kualitatif, serta (4) member checking untuk memastikan interpretasi data kualitatif sesuai dengan perspektif informan. Prinsip etika penelitian juga dijunjung tinggi dengan menjamin kerahasiaan data responden, persetujuan informan sebelum wawancara dilakukan, serta penyimpanan data yang aman dan hanya untuk keperluan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Hasil Kuantitatif

Survei kuantitatif dilakukan kepada 152 responden ASN dari beberapa OPD strategis di Kabupaten Sorong. Data menunjukkan bahwa tingkat kesiapan green government berada pada kategori sedang, dengan skor indeks rata-rata 3,21 dari 5,00. Skor ini menunjukkan bahwa kesiapan sudah tampak, namun belum sepenuhnya mantap dan merata di seluruh aspek.

Tabel 1. Rincian per Dimensi

Dimensi	Skor Rata-rata	Interpretasi
Regulasi & Kebijakan	3,45	Cukup siap
Kapasitas SDM	3,12	Sedang
Kelembagaan	3,19	Sedang
Teknologi Digital (SPBE/Smart Office)	3,38	Cukup siap
Partisipasi Publik	3,02	Sedang
Implementasi Inisiatif Hijau	3,10	Sedang
Komitmen Pimpinan	3,38	Cukup kuat

Dari paparan data diatas menyatakan bahwa dimensi teknologi digital SPBE menempati skor tertinggi, terutama pada penggunaan aplikasi perkantoran dan e-dokumen untuk mengurangi kertas. Dimensi partisipasi publik menjadi yang terendah, menunjukkan bahwa transformasi hijau masih lebih bersifat internal birokrasi dibandingkan kolaboratif dengan masyarakat. Responden mengakui bahwa komitmen pimpinan daerah sudah terlihat, tetapi belum dibarengi dengan anggaran dan target evaluasi yang jelas. SDM masih mengalami keterbatasan pengetahuan teknis terkait tata kelola hijau, ekonomi hijau, dan manajemen lingkungan.

1.2. Hasil Kualitatif

Hasil wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan teknis pada OPD lingkungan, perencanaan, dan digitalisasi menunjukkan bahwa sebagian OPD telah memiliki struktur kerja dan pembagian tugas yang mendukung agenda kelestarian lingkungan, namun belum ada integrasi formal antar-OPD. Sebagian informan menyatakan bahwa praktik tata kelola hijau belum dipahami sebagai kebijakan strategis yang terukur, melainkan sebagai agenda pendukung. Hambatan internal muncul berupa kurangnya indikator evaluasi dan keterbatasan anggaran. Proses digitalisasi dokumen, surat-menyurat elektronik, dan penerapan e-office berjalan positif, namun belum dioptimalkan untuk efisiensi energi atau sistem data lingkungan.

Kolaborasi dengan masyarakat dan sektor privat dalam agenda tata kelola hijau masih terbatas. Sosialisasi dan edukasi publik menjadi kebutuhan mendesak.

1.3. Integrasi Temuan Mixed Methods

Integrasi data menunjukkan bahwa

- a. Data angka memperlihatkan kesiapan green government berada pada kategori sedang.
- b. Data naratif menegaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh komponen-komponen kunci seperti komitmen pimpinan, kapasitas SDM, dan koordinasi antar-OPD.
- c. Faktor penguat, digitalisasi pemerintahan dan kemauan belajar aparatur.
- d. Faktor pelemah, minim anggaran dan belum adanya pedoman implementasi hijau yang baku.

Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki fondasi awal yang kuat, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan strategi kebijakan agar transformasi menuju green government menjadi lebih terarah.

2. Pembahasan

2.1. Kesiapan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong telah memiliki elemen-elemen dasar menuju tata kelola hijau, seperti komitmen pimpinan daerah, pemanfaatan teknologi pemerintahan digital, serta kesadaran aparatur mengenai pentingnya kebijakan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keberhasilan green government sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan komitmen aktor birokrasi dalam mengadopsi nilai hijau. Namun, kesiapan ini belum mengarah pada aplikasi yang terstruktur dan terukur. Tidak adanya indikator evaluasi hijau, minimnya integrasi antar-OPD, serta absennya strategi kolaborasi publik menjadi tanda bahwa pemerintah masih berada pada fase transisional.

2.2. Digitalisasi Sebagai Katalis Transformasi Hijau

Dimensi teknologi memperoleh skor tertinggi dalam survei. Hal ini menandakan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan melalui aplikasi manajemen dokumen, surat digital, dan SPBE telah berhasil mengurangi penggunaan kertas dan waktu pelayanan. Kondisi ini sejalan dengan riset global yang menemukan bahwa digitalisasi merupakan katalis penting menuju model green governance karena meningkatkan efisiensi sumber daya dan transparansi dalam layanan publik. Namun, digitalisasi di Kabupaten Sorong masih bersifat administratif, belum diarahkan sebagai sistem data lingkungan atau manajemen energi kantor pemerintahan.

2.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas SDM menunjukkan skor sedang. Aparatur menyatakan belum memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan kebijakan hijau yang memadai. Kondisi ini mencerminkan pola umum pemerintahan daerah di Indonesia, di mana agenda transformasi digital lebih cepat berkembang dibandingkan transformasi hijau. Pelatihan aparatur mengenai

tata kelola lingkungan, ekonomi hijau, dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting agar konsep green government tidak berhenti sebagai jargon, melainkan menjadi praktik profesional harian.

2.4. Partisipasi Publik

Partisipasi publik memiliki skor terendah. Padahal, tata kelola hijau menuntut kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal. Rendahnya keterlibatan publik, termasuk sektor privat, menunjukkan bahwa agenda hijau masih dipahami sebagai urusan internal pemerintah. Penguatan kebijakan komunikasi publik, transparansi data lingkungan, dan forum konsultatif menjadi sarana strategis untuk memperbesar dampak green government.

2.5. Komitmen Pimpinan

Skor dimensi komitmen pimpinan berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan adanya dukungan politik, namun belum diikuti perangkat kebijakan formal seperti Perda atau Perkada yang spesifik mengatur tata kelola hijau. Institusionalisasi kebijakan akan memperkuat keberlanjutan implementasi green government, menghindari ketergantungan pada figur pimpinan, dan memastikan mobilitas program lintas periode pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menerapkan *green government* berada pada kategori **sedang**. Fondasi awal sudah terlihat melalui komitmen pimpinan daerah dan penggunaan teknologi digital dalam layanan pemerintahan. Namun, penerapan tata kelola hijau masih belum optimal karena kapasitas SDM, koordinasi antar-OPD, regulasi pendukung, serta partisipasi publik belum berkembang secara maksimal. Dengan demikian, transformasi menuju tata kelola hijau masih berada pada tahap awal dan membutuhkan penguatan strategi kebijakan agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi resmi dan indikator kinerja hijau yang jelas untuk memperkuat arah kebijakan.
2. Kapasitas SDM aparatur harus ditingkatkan melalui pelatihan rutin terkait isu tata kelola lingkungan.
3. Teknologi digital yang telah berkembang perlu dioptimalkan untuk mendukung target lingkungan, bukan hanya efisiensi administrasi.
4. Partisipasi dan kolaborasi publik harus diperluas melalui sosialisasi, kemitraan, dan edukasi lingkungan yang berkelanjutan.

Reference

- Bahri, S., Rasyid, A., & Saputra, H. A. (2024). *A Portrait of Green Economy Governance in Sustainable Development in Eastern Indonesia*. 557–572.
- Fu, Y.-H. & H.-C. Y. (2025). Does E-government boost environmental performance? *Economic Analysis and Policy* *Economic Analysis and Policy*, 88, 422–436.
- Kasturi, I. H. I. A. I. M. L. W. R. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR*. 09, 104–120.
- Khodaparasti, R. B., & Bagheri, H. (2023). *Antecedents and consequences of green public administration*. 39–57.
- Lackson, C. M., John, B., & Joseph, K. (2025). *A Mixed-Methods Framework for Environmental , Social , and Governance Analysis : Insights from Emerging Markets*. 17(1), 70–91.
- Marinescu, P., Veith, C., & Sima, A. G. (2024). *Shaping Sustainable Futures : Public Policies and Renewable Energy Insights Based on Global Bibliometric Analysis*.
- Megawati, S., Alfarizi, M., Eprilianto, D. F., & Hilmi, A. N. (2024). *Fostering local SDGs performance with green government initiative : Insights from Sidoarjo Regency , Indonesia*. 01006.
- Megawati, S., Alfarizi, M., & Syamsul, M. R. (2024). *International Journal of Sustainable Development and Planning Key Advantages of the Green Government Initiative in*

Achieving Local Public Service Performance and Sustainable Development. 19(11), 4361–4375.

Nasios, G., & Ph, D. (2025). *Abbreviated Key Title : ISRG J Arts Humanit Soc Sci Green Policies in Public Administration: Insights from the Greek Case. 7672, 80–86.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17110820>

Sasfiani, S., & Adelia, C. (2024). *A Comprehensive Guide to Research Design , Methods , and Methodology for Public Administration Scholars and Practitioners. 1(1), 25–34.*

Sugiono, S. (2021). *Peran E-Government Dalam Membangun Society 5. 0 : 5, 115–125.*

Sundah, D. I. E. (2024). *INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE LOCAL GOVERNANCE BEST. 16(1), 46–59.*

Wiswayana, W. M., Yunita, P., Indraswari, F. V., & Ponce, E. J. A. (2024). The Contribution of Local Wisdom in the Green Governance Framework in Bromo Tengger Semeru National Park. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research, 5(4), 549–555.*